

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN JAYAPURA

Muhammad Ramadhan¹
Transna Putra Urip²
transnaputra@feb.uncen.ac.id
Marsi Adi Purwadi³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten jayapura. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian dapat dikatakan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten jayapura tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak patuh dalam membayar pajak. dengan rata – rata persentase yang lebih kecil daripada 61%. Dengan rata-rata persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan dengan warna plat hitam sebesar 42%, warna plat kuning sebesar 56%, warna plat merah sebesar 47% dan Total wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 43%. Sehingga dapat dikatakan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten jayapura tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak patuh dalam membayar pajak. Walaupun Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor milik pribadi umum dan pemerintah masih rendah atau tidak patuh seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor Realisasi untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan dengan rata – rata realisasi total PKB sebesar 13.993.897.330 pertahun.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Suatu pembangunan nasional harus dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Indonesia harus terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual dalam rangka mewujudkan tercapainya pembangunan nasional yang telah di targetkan.

Demi mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan adanya suatu kerjasama atau hubungan timbal balik antara Pemerintah dengan seluruh warga negara Indonesia yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat baik di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya maupun dari aspek hukum. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri salah satunya yang diperoleh dari pajak.

Sektor pajak merupakan salah satu sektor pendukung bagi pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya demi tercapainya apa yang direncanakan maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk memungut pajak dari masyarakat. Pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu cara untuk memperoleh pendapatan. Dalam pemungutan pajak dari masyarakat masi kurang efektif dan banyak masalah yang dihadapi. Salah satunya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di indonesia karena jika wajib pajak

¹ Alumni Magister Ilmu Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

Tidakpatuh makadapamenimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.

Menurut Samudra (2015:92) “Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor” Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang memakai kendaraan bermotor, maka bertambah juga penerimaan Negara dari sektor pajak.

Seiring dengan perkembangan daerah Kabupaten Jayapura jumlah kendaraan bermotor Kabupaten Jayapurasemakin meningkat setiap tahunnya, kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan umum bagi masyarakat dan dapat dipastikan disetiap rumah memiliki kendaraan bermotor seiring meningkatnya pendapatan masyarakat dan para pengguna kendaraan bermotor dikenakan pajak kendaraan bermotor, sehingga pajak kendaraan bermotordiharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Sudah Membayar Pajak Dan Yang Masih Menunggak Di Kabupaten Jayapura

Tahun	Unit Yang Terealisasi	Unit Yang Menunggak	Jumlah Wajib Pajak	Persentase
2014	19.736	21.277	41.013	48%
2015	20.319	24.985	45.304	44%
2016	20.633	29.363	49.996	41%
2017	22.891	31.199	54.090	42%
2018	24.066	34.443	58.509	41%

Sumber : SAMSAT Kabupaten Jayapura Tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat dinyatakan bahwa unit yang masih menunggak untuk membayar pajak dari tahun 2014 sampai 2018 lebih dari 50 persen dari wajib pajak yang terdaftar.

Melihat kondisi demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jayapura” Dengan mengetahui tingkat kepatuhan tersebut maka dapat diprediksi perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Jayapura.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kabupaten jayapura ?
2. Bagaimana perkembangan Realisasi PKB di kabupaten jayapura ?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kabupaten jayapura
2. Mengetahui perkembangan Realisasi PKB di kabupaten jayapura

Batasan Masalah

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jayapura.

Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Jayapura Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi penelitian-penelitian mengenai analisis tingkat kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jayapura.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Fokus penelitian dalam pembahasan ini adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan penelitian ini berada di Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat jenis dan kebutuhan data/informasi yang mendukung proses analisis dan perumusan pemecahan masalah, sebagai berikut:

Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara menarik sampel dari unit sampel tertentu yang berhubungan dan dipelajari secara lebih mendalam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor samsat Kabupaten Jayapura. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Jumlah kendaraan yang aktif membayar PKB, rekap jumlah kendaraan bermotor, dan Realisasi PKB di Kantor samsat kabupaten jayapura.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder untuk memperoleh data yang diperlukan. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.

Selain itu ada data yang diperoleh melalui data dokumen, kepustakaan dan sumber tertulis lainnya yang memiliki hubungan dengan pokok bahasan yang diteliti. Data yang dibutuhkan meliputi data dokumen Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar Kabupaten Jayapura.

Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif adalah memberikan deskripsi mengenai karakteristik variabel penelitian yang sedang diamati.

Dalam penelitian ini peneliti telah menentukan banyaknya variasi untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang akan diukur berdasarkan formula dan kriteria yang di tetapkan dan Realisasi PKB.

Formula yang digunakan:

$$Kwp = Wpb/Twp \times 100\%$$

Kwp : tingkat kepatuhan wajib pajak

Wpb : Wajib pajak yang membayar

Twp : Total wajib pajak

Adapun Kriteria nilai tingkatan kepatuhan sebagai berikut:

Tabel 2.

Kriteria tingkat kepatuhan wajib pajak

Interval	Kriteria
80% - 100%	Tinggi
61% - <80%	Cukup Tinggi
<61%	Rendah

Sumber : SE.DJP No 18/PJ/2006

Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik kesimpulannya. (sugiyono,2007).

Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Kepmendagri no.25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 3).Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor baik milik pribadi atau umum yang digunakan di jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik dengan menggunakan system bagi hasil dengan provinsi sebesar 30% kepada Kabupaten.
- 2 Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun pengukuran tingkat kepatuhan berdasarkan surat Edaran Dirjen Pajak SE-18/PJ/2006 tanggal 27 juli 2006 tentang *Key Performance Indicator* sebagai berikut :
Nilai tingkat kepatuhan dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.

Interval	Kriteria
80% - 100%	Tinggi
61% - <80%	Cukup Tinggi
<61%	Rendah

Sumber : SE.DJP No 18/PJ/2006

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Warna Plat

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang akan di analisis berdasarkan formula dan kriteria yang sudah di ditetapkan berdasarkan warna plat sebagai berikut :

Tabel 4.

Wajib Pajak Kendaraan Yang Sudah Membayar Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Menurut Warna Plat Hitam

Tahun	Unit Yang Terealisasi	wajib pajak	Persentase	Kriteria
2014	17.658	37.235	47%	Rendah
2015	18.147	41.255	44%	Rendah
2016	18.509	45.604	40%	Rendah
2017	20.456	49.450	41%	Rendah
2018	21.633	53.703	40%	Rendah
Rata-rata persentase			42%	

Sumber : Data diolah tahun 2019

Berdasarkan data Tabel 4 menunjukkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan warna plat hitam yang tertinggi adalah tahun 2014 sebesar 47% dan yang terendah adalah tahun 2018 sebesar 40% namun Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor warna plat hitam dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat dikatakan rendah atau tidak patuh.

Mengacu terhadap kriteria tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan warna plat hitam data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat dikatakan tidak patuh dalam membayar pajak dengan rata-rata persentase 42%.

Tabel 5.
Wajib Pajak Kendaraan Yang Sudah Membayar Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Menurut Warna Plat Kuning

Tahun	Unit Yang Terealisasi	Wajib pajak	Persentase	Kriteria
2014	1.076	1.863	57%	Rendah
2015	1.101	1.949	56%	Rendah
2016	1.024	1.956	52%	Rendah
2017	1.215	2.015	60%	Rendah
2018	1.207	2.059	58%	Rendah
Rata-rata persentase			56%	

Sumber : Data diolah tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan warna plat kuning yang tertinggi adalah tahun 2017 sebesar 60% dan yang terendah adalah tahun 2016 sebesar 52% namun tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan warna plat kuning dari tahun 2014 sampai 2018 dapat dikatakan rendah.

Mengacu pada kriteria tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan warna plat kuning pada tahun 2014 sampai 2018 dapat dikatakan tidak patuh dalam membayar pajak dengan rata-rata persentase 56%.

Tabel 6.
Wajib Pajak Kendaraan Yang Sudah Membayar Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Menurut Warna Plat Merah

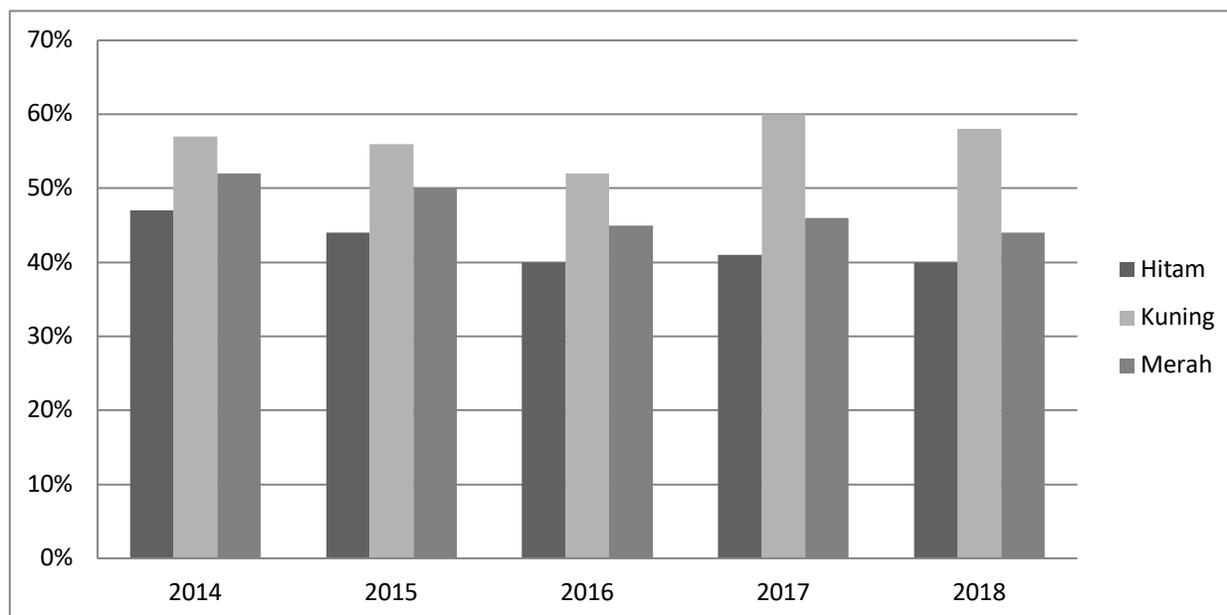
Tahun	Unit Yang Terealisasi	Wajib pajak	Persentase	Kriteria
2014	1.002	1.912	52%	Rendah
2015	1.071	2.127	50%	Rendah
2016	1.100	2.433	45%	Rendah
2017	1.220	2.622	46%	Rendah
2018	1.226	2.748	44%	Rendah
Rata-rata persentase			47 %	

Sumber : Data diolah tahun 2019

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan warna plat merah yang tertinggi adalah tahun 2014 sebesar 52% dan yang terendah adalah tahun 2018 sebesar 44%. namun tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan dengan plat warna merah dari tahun 2014 sampai 2018 dapat dikatakan rendah.

Mengacu pada kriteria tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan warna plat merah pada tahun 2014 sampai 2018 dapat dikatakan tidak patuh dalam membayar pajak dengan rata-rata persentase 47%.

Grafik 1.
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Warna Plat Hitam, Kuning, Dan Merah



Berdasarkan grafik 5.1 tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling tinggi adalah tahun 2017 pada nomor warna kendaraan kuning dan yang paling rendah adalah tahun 2016 dan 2018 pada warna plat hitam.

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang paling patuh adalah nomor warna kendaraan kuning atau kendaraan milik umum atau perusahaan dengan rata – rata persentase tingkat kepatuhan 57% Dan yang paling tidak patuh adalah nomor warna kendaraan hitam atau milik pribadi atau masyarakat dengan persentase rata – rata persentase tingkat kepatuhan 42 %.

Tingkat Kepatuhan Total Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Jayapura

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang akan di analisis berdasarkan formula dan kriteria yang sudah di tetapkan berdasarkan total kendaraan yang terdaftar sebagai berikut :

Table 7.
Tingkat Kepatuhan Total Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Unit Yang Terealisasi	Wajib Pajak	Persentase	Kriteria
2014	19.736	41.013	48%	Rendah
2015	20.319	45.304	44%	Rendah
2016	20.633	49.996	41%	Rendah
2017	22.891	54.090	42%	Rendah
2018	24.066	58.509	41%	Rendah
Rata-rata persentase			43%	

Sumber : Data diolah tahun 2019

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan total wajib pajak kendaraan dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami penurunan dan dapat dikatakan rendah.

Mengacu pada kriteria tingkat kepatuhan total wajib pajak kendaraan pada tahun 2014 sampai 2018 dapat dikatakan rendah atau tidak patuh dalam membayar pajak dengan rata-rata persentase 47%.

Total Kendaraan Dan Realisasi Pkb Kendaraan Umum Dan Pribadi Tahun 2014 – 2018

Berikut adalah Realisasi PKB meliputi jenis kendaraan milik pribadi dan umum dari tahun 2014 sampai 2018 yang telah diolah.

Tabel 8
Total Kendaraan Dan Realisasi PKBKendaraan Umum Dan Pribadi Tahun 2014 – 2018

Jenis KB	Tahun 2014		2015		2016	
	Jumlah	Realisasi Rp.	Jumlah	Realisasi Rp.	Jumlah	Realisasi Rp.
Sedan, Jeep, Station wagon (Pribadi)	3.024	3.653.746.100	3293	4.461.539.900	3619	5.172.235.750
Sedan, Jeep, Station wagon (Umum)	1.181	278.495.000	1199	465.801.300	1206	490.209.400
Bus, Micro bus (Pribadi)	12	27.545.500	13	26.866.500	13	46.340.100
Bus, Micro bus (Umum)	20	10.891.900	20	16.025.800	22	15.292.400
Truck, Pick up (Pribadi)	1.292	2.182.584.100	1474	2.491.128.700	1602	2.383.488.600
Truck, Pick up (Umum)	662	647.117.400	689	845.629.600	728	804.202.100
Kendaraan khusus (Pribadi)	25	14.818.700	27	23.329.000	33	29.659.300
Sepeda Motor	32.864	3.017.497.900	36444	3.175.735.800	40337	3.313.666.600
Total	39.080	9.832.605.600	43159	11.506.056.600	47560	12.255.094.250
Jenis KB	Tahun 2017		Tahun 2018			
	Jumlah	Realisasi Rp.	Jumlah	Realisasi Rp.		
Sedan, Jeep, Station wagon (Pribadi)	3894	7.972.350.900	4213	8.691.682.000		

Sedan, Jeep, Station wagon (Umum)	1227	603.036.300	1232	606.095.000
Bus, Micro bus (Pribadi)	15	59.200.800	16	72.651.000
Bus, Micro bus (Umum)	20	17.087.100	21	19.076.000
Truck, Pick up (Pribadi)	1815	2.906.458.900	1968	3.445.809.000
Truck, Pick up (Umum)	768	1.196.925.900	806	1.349.455.000
Kendaraan khusus (Pribadi)	43	97.256.100	46	60.737.600
Sepeda Motor	43684	4.499.870.600	47459	4.778.038.000
Total	51466	17.352.186.600	55761	19.023.543.600

Sumber : Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 8 yang menunjukkan total kendaraan dan realisasi PKB tahun 2014 sampai 2018 dapat dikatakan bahwa kendaraan dan Realisasi PKB kendaraan milik pribadi dan umum dari tahun 2014 sampai 2018 secara berturut – turut mengalami kenaikandengan rata – rata Realisasi PKB 13.993.897.330 pertahun.

Dapat dikatakan juga realisasi terbesar setiap tahunnya adalah pada kendaraan Sedan, Jeep, dan station wagon milik pribadi dengan rata - rata realisasi 5.990.310.930 pertahunnya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kantor Samsat Kabupaten Jayapura hingga tahun 2018, jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 58.509 dari berbagai jenis kendaraan bermotor tersebut antara lain Sedan, Jeep, Minibus, Microbus, Bus, Pick up, Blind Van, Light Truck, Truck, Ransus, Ambulance, Mobil Jenazah, Sepeda Motor Roda Dua, dan Sepeda Motor Roda tiga. Dan warna plat yaitu Hitam, Kuning, Dan Merah.

Hasil menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan warna plat hitam atau kendaraan milik masyarakat, kuning atau kendaraan milik suatu perusahaan, dan merah atau kendaraan milik pemerintah dari tahun 2014 sampai tahun 2018 yang membayar tercatat plat hitam 21.633 dari total 53.703, plat kuning 1.207 dari total 2.059 plat merah 1226 dari total 2.748 dan total wajib pajak kendaraan 24.066 dari total 58.509 perhitungan persentase yang masih lebih kecil dari 61 % dengan rata-rata persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan dengan warna plat hitam sebesar 42%, warna plat kuning sebesar 56%, warna plat merah sebesar 47% dan Total wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 43%. Sehingga dapat dikatakan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten jayapura tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak patuh dalam membayar pajak. Namun berdasarkan persentase rata-rata tingkat kepatuhan yang paling tinggi adalah wajib pajak kendaraan dengan warna plat kuning atau kendaraan milik suatu perusahaan dengan persentase

rata-rata sebesar 56% dan yang paling rendah adalah wajib pajak kendaraan dengan warna plat hitam dengan persentase rata-rata sebesar 42%.

Mengacu pada persentase tingkat kepatuhan dengan plat warna hitam atau kendaraan milik masyarakat, kuning atau kendaraan milik perusahaan, dan merah atau kendaraan milik pemerintah tingkat kepatuhan yang tertinggi adalah tingkat kepatuhan kendaraan dengan plat warna kuning atau kendaraan milik perusahaan pada tahun 2017 sebesar 60% dan yang paling rendah atau yang paling tidak patuh adalah plat warna hitam atau kendaraan milik masyarakat pada tahun 2018 sebesar 40%.

Namun untuk Realisasi PKB kendaraan milik pribadi dan umum menurut hasil analisis dari tahun 2014 sampai 2018 secara berturut – turut mengalami kenaikan berturut – turut mengalami kenaikan dengan rata – rata penerimaan PKB 13.993.897.330 pertahun.

Dapat dikatakan juga realisasi terbesar setiap tahunnya adalah pada kendaraan Sedan, Jeep, dan station wagon milik pribadi dengan rata - rata realisasi 5.990.310.930 pertahunnya.

Hasil penelitian yang dilakukan Veronica Logho mengenai Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Wamena Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan yang tercatat pada sebesar 669 badan namun yang memiliki NPWP sebanyak 237 Badan dan yang tidak memiliki NPWP sebanyak 432 Badan. Sesuai persentase, Badan yang memiliki NPWP belum mencapai 50% dari 669 Badan yang tercatat, sehingga belum dapat dikatakan patuh dalam memiliki NPWP hal ini sejalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang kendaraan bermotor di kabupaten jayapura yang belum dapat dikatakan patuh dalam membayar pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian maka dapat di tarik kesimpulan.

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menurut warna plat hitam atau kendaraan milik masyarakat, kuning atau kendaraan milik perusahaan, dan merah atau kendaraan milik pemerintah tahun 2014 sampai 2018 dapat dikatakan kesadaran wajib pajak masih relatif rendah atau tidak patuh dalam membayar pajak dengan rata – rata persentase yang lebih kecil daripada 61%. dengan rata-rata persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan dengan warna plat hitam sebesar 42%, warna plat kuning sebesar 56%, warna plat merah sebesar 47% dan Total wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 43%. Sehingga dapat dikatakan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten jayapura tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak patuh dalam membayar pajak.
2. Walaupun Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor milik pribadi umum dan pemerintah masih rendah atau tidak patuh seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor Realisasi untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan dengan rata – rata realisasi total PKB sebesar 13.993.897.330 pertahun.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis menuliskan saran yaitu :

1. Pemerintah bisa membuat suatu operasi ketertiban lalu lintas seperti pemeriksaan pada STNK agar dapat diketahui kewajiban pemilik kendaraan tiap beberapa bulan secara rutin, Dan Pemerintah juga harus memerhatikan lagi kewajiban pemerintah sebagai wajib pajak khususnya pajak kendaraan bermotor milik pemerintah.

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan supaya mengkaji lebih dalam tentang Kendala-kendala Tingkat Kepatuhan Wajib.

DAFTAR PUSTAKA

Firmansyah, R. (2013). Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di kabupaten Karimun. UINSSK Riau;

- Hamzah, M. (2013) . Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat, Makassar.;
- Hidayat, Rahmat. (2012). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sulawesi Tengah;
- Kantor samsat Kabupaten Jayapura . Jumlah Kendaraan yang Aktif Membayar PKB dan Rekap Jumlah Kendaraan Bermotor 2014 – 2018;
- Logho, S V. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Wamena;
- Mardiasmo. (2001). Perpajakan Indonesia edisi revisi, Yogyakarta. Andi CV;
- Pratama, Satria, Iek, Mesak; Patty, Richard; (2018). Analisis Kemandirian Fiskal Di Provinsi Papua 2012 – 2016. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume V No. 3, Desember 2018;
- Rumbouw, Abika, C.; Urip, Transna, P.; Sanggrangbano, Agustina. (2019). Analisis Presepsi Masyarakat Terhadap Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume VI No. 1, April 2019;
- Rustiyarningsih, Siti. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Madiun;
- Samudra . (2015). Perpajakan di Indonesia.Jakarta: PT.RajaGrafindo;
- Sari, R. Nempung, T. Dan Suriadi, L.O. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Vo;ume 1 Nomor 1 2016;
- Suliyanto. (2006). Metode Riset Bisnis. CV ANDI OFFSET, Yogyakarta;
- Undang - undang No 13 Tahun 2003. Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.